

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN  
DI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DESA SESAP KECAMATAN TEBING  
TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 – 2014**

**Oleh :**

**M. Viqy Saputra Misya**

**Email :** [Viqysaputramisya@gmail.com](mailto:Viqysaputramisya@gmail.com)

**Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63272

**ABSTRACT**

*This paper aims to determine Efforts of Local Government in Improving Education in Remote Indigenous Communities Village Sesap District of Tebing Tinggi District Meranti Islands Year 2011 - 2014 and Factors - Factors hindering the efforts of Local Government in Improving Education in Remote Indigenous Communities Village Sesap District of Tebing Tinggi District Meranti Islands in 2011 - 2014. the research method used in this study with the type of case studies and field research. The research approach with a qualitative approach to the type of data used primary data and secondary data, the data sources obtained from the informant research, mass media, and documentation. Data were collected by interview, and search document, and then analyzed by the case method and field research to learn intensively about the background of current affairs and environmental interactions appropriate social unit.*

*The results showed that the efforts of Local Government in Improving Education in Remote Indigenous Communities Village sesap still not optimal because there are still so many people the Remote Indigenous Communities that do not follow the program package A, B and program Functional Literacy and Skills Functional in Center Community Learning Center, and scholarships for poor students is not used well by the parents, by used for daily needs and not used for their children school supplies, local government should be more selective again making policy these scholarships , While a student hostel tribal / KAT is not functioning optimally because only a few KAT who want to continue schools and stay in this hostel, the local government should further improve the dissemination make the community more aware of the importance of education / schooling, in order to motivate and sensitize the parents on Remote Indigenous Communities this will be the importance of education of their children, due to lack of education caused ignorance the parents.*

**Keywords: Effort, Education, Remote Indigenous Communities**

## PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, sebab pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan bagi setiap jiwa yang tumbuh dan berkembang tiada hentinya, untuk itu pendidikan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat yang hidup di kota maupun daerah terpencil, lokasi daerah yang terpencil dan jauh dari kota tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke - 4, yaitu :

*“mencerdaskan kehidupan bangsa”*, dapat terwujud secara adil dan merata.

Pendidikan sangat berkaitan erat dengan kemiskinan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemiskinan sudah pasti mempengaruhi pendidikan masyarakat, dimana masyarakat miskin sangat rentan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini disebabkan oleh kurangnya minat belajar, kurangnya rasa keinginan tahun, dan lingkungan yang tidak mendukung untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan sangat perlu diperhatikan, sebab pendidikan sangat penting dalam kehidupan, pendidikan yang tinggi akan menekan tingkat kemiskinan masyarakat, sebab masyarakat yang berpendidikan akan berpikiran lebih maju, rasa ingin tahu yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dapat menekan angka pengangguran, masyarakat yang berpendidikan sudah pasti dikategorikan masyarakat yang sejahtera, karena dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, sebaliknya apabila masyarakat berpendidikan rendah, tentu mereka tidak dapat berpikiran lebih

maju dan tidak memiliki minat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik yang berujung tingkat kesejahteraan yang rendah.

Untuk itu pendidikan sangat penting untuk mengembangkan potensi diri dalam kehidupan masyarakat, karena setiap manusia memerlukan pendidikan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usia, bakat, minat dan kecerdasannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa :

*“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”* dan ayat 3 menegaskan bahwa *“pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang – undang.”*<sup>1</sup>

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kepulauan Meranti sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas daerah 3.707.84 km<sup>2</sup> terdiri dari 4 gugus pulau yaitu Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Rangsang.<sup>2</sup>

Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Daerah Otonom sebagai salah satu bentuk Desentralisasi Pemerintahan, pada

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti masih banyak tersebar Komunitas Adat Terpencil yang disingkat (KAT), dikutip melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 09 tahun 2012, pasal 1 ayat 3, KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.<sup>3</sup> KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebar disetiap Kecamatan, baik itu di Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, Rangsang Pesisir dan Tasik Putri Puyu. Dimana 9 Kecamatan, dan 38 Desa, di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebar Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan jumlah jiwa sebanyak 9,100, jumlah KAT yang signifikan besar harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, apa lagi dibidang pendidikannya, terkait masalah masih banyaknya KAT yang pendidikannya masih sangat rendah dimana kebanyakan anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan putus sekolah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berusaha meningkatkan pendidikan dengan cara membangun sekolah-sekolah baik itu sekolah setara tingkat SD, SMP, SMA/SMK/MA disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun jarak antara sekolah dengan desa-desa yang ada di Kecamatan cukup jauh

sehingga masih banyak KAT yang tidak bisa bersekolah dan putus sekolah

Namun dari banyaknya sekolah yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, masih banyak KAT yang pendidikannya masih sangat rendah, sedangkan jarak antara sekolah tidak begitu jauh, berbeda dengan KAT yang ada di Kecamatan-Kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Meranti yang jaraknya jauh dari sekolah yang ada dan jumlah sekolah yang tidak begitu banyak sehingga akses KAT untuk bersekolah susah.

Di Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Sesap, yang masih banyaknya KAT yang pendidikannya masih sangat rendah, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah, di Desa Sesap ini bukan desa yang daerahnya sangat terpencil, namun di Desa Sesap ini mayoritas masyarakatnya adalah KAT yang bersukukan suku asli.

Desa Sesap ini mayoritasnya adalah KAT yang bersukukan suku asli, sebanyak 77% penduduk di Desa Sesap ini suku asli, di Desa Sesap ini masih sangat banyak KAT pendidikannya masih sangat rendah, dimana mereka masih menganggap pendidikan adalah hal yang tidak terlalu penting, dari hasil wawancara saya menunjukkan bahwa KAT di Desa Sesap, mereka lebih memilih bekerja dari pada sekolah, bagi yang sudah tamat SD untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP pun mereka tidak mau, dengan alasan tidak adanya sekolah tingkat SMP di sekitar Desa, sehingga mereka enggan untuk menyambung pendidikan ke tingkat SMP dikarenakan tidak adanya transportasi, memang di Desa Sesap ini hanya memiliki sarana dan prasarana pendidikan TK/PAUD, MDA dan sekolah tingkat dasar SD, SDN 21 Desa Sesap, yang memiliki 9 ruang kelas, 1 perpustakaan dan 13 guru, jumlah murid pun lumayan banyak di tahun 2011 sebanyak 108, tahun 2012 sebanyak 145,

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

tahun 2013 sebanyak 185, dan tahun 2014 sebanyak 104, walaupun di Desa Sesap hanya mempunyai sarana dan prasarana pendidikan TK/PAUD, MDA dan sekolah tingkat dasar SD, untuk melanjutkan ke pendidikan SMP dan SMA/SMK/MA tidak begitu jauh jarak tempuh hanya 6 kilo meter ke pusat kota Kecamatan Tebing Tinggi, yang mana mempunyai 11 sekolah tingkat SMP dan 10 sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan juga jarak terdekat 2 kilo meter ke Desa sebelah yaitu Desa Alah Air yang mana ada sekolah setara tingkat SMP, SMA/SMK/MA, namun dari data yang saya peroleh dan dibantu data sekunder yang sudah ada, dari tahun 2011 - 2014 jumlah penduduk KAT di Desa Sesap, di tahun 2011 sebanyak 470, tahun 2012 sebanyak 470, tahun 2013 sebanyak 480, tahun 2014 sebanyak 494, dari tahun 2011 - 2014 tidak ada satupun dari KAT yang pernah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP maupun SMA/SMK/MA, kebanyakan dari KAT ini putus sekolah, mereka hanya menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), KAT di Desa Sesap ini juga masih sangat banyak yang tidak menyentuh pendidikan sama sekali.

Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dan kesadaran dari masyarakat ini masih jauh tentang pentingnya pendidikan, karena suatu kebiasaan yang telah turun temurun pada KAT ini lebih memilih bekerja dari pada sekolah, ketika anak usia sekolah seharusnya bersekolah, mereka lebih ingin mengikuti orangtuanya bekerja memotong kayu mangrove dan menyusun kayu mangrove untuk dijadikan kayu arang ataupun mencari ikan dilaut, disini mencerminkan bahwa sangat rendahnya kesadaran orangtua dalam memperhatikan pendidikan anaknya, rendahnya pendidikan KAT ini tidak boleh dibiarkan terus menerus, dikarenakan akan semakin banyaknya penduduk dari KAT ini yang kualitas hidupnya tidak sejahtera.

Namun, dari upaya yang telah dilakukan, masih sangat belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih sangat banyak KAT ini, yang tidak mementingkan pendidikan mereka, dikarenakan ditahun 2011 sampai tahun 2014 yang mengikuti program pendidikan paket A dan paket B masih sedikit, sedangkan anak usia sekolah di KAT bersukukan suku asli yang tidak sekolah maupun putus sekolah masih sangat banyak, untuk itu Pemerintah Daerah melalui instansi-instansi terkait harus saling berkoordinasi dan melakukan pengawasan disetiap program yang telah dibuat agar menemukan solusi yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ingin mengkaji upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama terkait dalam permasalahan pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DESA SESAP KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 - 2014.

## **KERANGKA TEORI**

### **Fungsi Pemerintahan**

Fungsi *Funcation* menurut kamus didefinisikan sebagai “*the kind of action or activity proper to any person or thing; the purpose for which something is designed or exists; role.*” Berdasarkan definisi pertama bahwa fungsi pemerintahan adalah apa saja kegiatan pemerintah, jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah, pemerintah dianggap given, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Menurut definisi yang kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut

pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dibentuk untuk melayani atau sebagai pelayanan masyarakat atau istilah yang lebih gagah adalah abdi negara.<sup>5</sup>

Rasyid berpendapat bahwa fungsi – fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian,<sup>6</sup> yaitu :

1. Pelayanan (*Public Service*);
2. Pembangunan (*Development*);
3. Pemberdayaan (*Empowering*);
4. Pengaturan (*Regulation*);

Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.<sup>7</sup>

### **Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan Pendidikan merupakan terjemahan dari “*educational policy*”, yang tergabung dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Jadi kebijakan

pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.<sup>9</sup>

Carter V. Good yang dikutip oleh Ali Imran memberikan pengertian Kebijakan Pendidikan sebagai pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.<sup>10</sup>

### **Koordinasi**

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate* (mengatur), dengan demikian koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang

---

<sup>4</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2005. Hal 57

<sup>5</sup> Prof. DR. H. Zaidan Nawawi, M.Si, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2015. Hal 25

<sup>6</sup> Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011. Hal 32

<sup>7</sup> Ibid, Hal 33

---

<sup>8</sup> H. M. Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. Hal 40.

<sup>9</sup> Ibid., Hal 41

<sup>10</sup> Ibid., Hal 40

sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama hal tertentu.<sup>11</sup>

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.<sup>12</sup>

Menurut Ndraha koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.<sup>13</sup>

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, dalam hal ini penilaian atau evaluasi dilaksanakan secara terukur, dengan kuantitas yang jelas baik pencapaian maupun target yang diinginkan. Dalam pengawasan terkandung keharusan untuk secara konkret menemukan hambatan apa yang terjadi, berikutnya tentu saja menemukan solusi yang tepat.<sup>14</sup>

Menurut M. Manullang memberikan pemahaman bahwa

---

<sup>11</sup> Taliziduhu Ndraha. *Kybernology(Illmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003 Hal 290

<sup>12</sup> Ibid., Hal 290

<sup>13</sup> Ibid., Hal 291

<sup>14</sup> Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH., MH. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal 4

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>15</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, sumber data diperoleh dari informan penelitian, media massa, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan penelusuran dokumen, kemudian dianalisis dengan cara metode kasus dan penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014 .

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, bahwa masih banyaknya Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Meranti yang pendidikannya masih sangat rendah dimana masih banyaknya Komunitas Adat Terpencil yang tidak sekolah maupun putus sekolah, dan tidak jarang masih banyaknya Komunitas Adat Terpencil yang masih buta aksara, salah satunya Komunitas Adat Terpencil di Desa Sesap. Desa Sesap ini bukan desa yang daerahnya sangat terpencil, namun di

---

<sup>15</sup> Ibid.

Desa Sesap ini Komunitas Adat Terpencil yang mayoritas masyarakatnya bersuku suku asli yang mana pendidikannya masih sangat rendah masih banyaknya anak usia sekolah tidak sekolah maupun putus sekolah, sedangkan di Kecamatan Tebing Tinggi adalah Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai banyak sekolah dari pada Kecamatan – Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan akses untuk bersekolah mudah, namun mayoritas masyarakat suku asli di Desa Sesap pendidikannya masih sangat rendah.

Menurut Soewargono dan Djohan menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat suatu kebijakan publik.<sup>16</sup> Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti membuat suatu kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu kebijakan pendidikan, agar masyarakat Komunitas Adat Tepencil di Desa Sesap ini memiliki pendidikan yang lebih baik lagi.

Kebijakan publik bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah, dan mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Riant Nugroho Kebijakan Pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik

di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.<sup>18</sup>

Kebijakan Pendidikan merupakan terjemahan dari “*educational policy*”, yang tergabung dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>19</sup>

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah - langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.<sup>20</sup>

Carter V. Good yang dikutip oleh Ali Imran memberikan pengertian Kebijakan Pendidikan sebagai pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan

---

<sup>16</sup> Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 37

<sup>17</sup> H. M. Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. Hal 59

---

18

<http://www.kajianteori.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>, waktu akses 15 april 2016

<sup>19</sup> H. M. Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. Hal 40

<sup>20</sup> Ibid, hal 41.

yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.<sup>21</sup>

• **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014.**

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014 dibidang pendidikan tentunya sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Meranti, meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, adalah sebagai berikut :

**A. Pelayanan (*Public Service*)**

**1. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A, B dan Program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional.**

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan fungsi pemerintahan adalah pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelayanan dibidang pendidikan Non Formal dengan cara penyelenggaraan pendidikan sekolah paket A, B, C dan juga program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional (KF), di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menekan angka putus sekolah maupun buta aksara, penyelenggaraan pendidikan Non Formal di PKBM diupayakan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, PKBM yang ada di

Kecamatan diadakan penyelenggaraannya di daerah - daerah terpencil, dikarenakan masyarakat daerah terpencil yang lebih dominan yang banyak putus sekolah maupun tidak sekolah sama sekali, sehingga masih banyak masyarakat yang buta aksara, namun berbeda dengan PKBM yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, dikarenakan tidak adanya daerah-daerah yang sangat terpencil di Kecamatan Tebing Tinggi ini, PKBM yang diadakan penyelenggaraannya berada di Desa Alah Air, melihat Desa Alah Air terletak di tengah – tengah Kecamatan Tebing Tinggi tidak jauh dari desa - desa lainnya begitu juga pusat kota Kecamatan dan sedikit lebih maju dari desa lainnya, lebih banyak sekolah yang ada sehingga sekolah - sekolah yang ada bisa dimanfaatkan untuk PKBM ini, namun PKBM yang berada di Desa Alah Air untuk masyarakat umum sehingga tidak ada masyarakat KAT yang bersukukan suku asli yang ikut serta, sedangkan mayoritas masyarakat yang banyak tidak sekolah maupun putus sekolah yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi adalah masyarakat KAT yang bersukukan suku asli yang berada di Desa Sesap, mayoritas masyarakat suku asli yang tidak sekolah sama sekali sebanyak 76 orang, 76 orang ini semuanya masih buta aksara, di Desa Sesap ini pun banyak yang putus sekolah, tidak ada masyarakat suku asli yang pernah menyelesaikan sekolah ditingkat SMP maupun SMA mereka hanya menyelesaikan sekolah ditingkat SD, banyaknya masyarakat KAT yang bersukukan suku asli yang tidak sekolah sama sekali dan putus sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan pendidikan sesuai fungsi pemerintahan memberikan pelayanan agar membuahkan keadilan dalam masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelayanan dibidang pendidikan Non Formal dengan cara penyelenggaraan pendidikan sekolah

---

<sup>21</sup> Ibid hal 40.



paket A, B dan juga program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional (KF), khusus untuk KAT yang bersukukan suku asli di Desa Sesap ini.

Di PKBM ini mengutamakan bagi masyarakat yang tidak sekolah maupun putus sekolah dari umur 10 – 44 tahun, namun lebih diprioritaskan untuk anak usia sekolah 7 – 18 tahun agar mereka mau sekolah lagi dengan mengikuti program paket, paket A setara dengan SD, dan paket B setara dengan SMP, sedangkan program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional (KF) adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan masyarakat penyandang buta aksara agar mereka mampu menulis, membaca dan berhitung. Selain memperkenalkan baca, menulis dan berhitung, juga menerapkan program pembelajaran Keterampilan Fungsional dimana peserta sambil belajar menulis, membaca, dan berhitung, mereka sekaligus belajar keterampilan untuk memperbaiki mutu dan taraf hidupnya, kegiatan pembelajaran keterampilan fungsional ini juga diarahkan pada pemberian keterampilan yang bersifat ekonomi produktif dan keterampilan sosial, contohnya keterampilan menjahit, membuat kue, membuat jaring, dan lainnya tergantung potensi daerah tersebut.

Di Desa Sesap ini penyelenggaraan pendidikan sekolah paket A, B dan juga program Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional (KF), khusus untuk suku asli dikarenakan masyarakat suku asli ini tidak mau bergabung dengan masyarakat lainnya, apa lagi masyarakat perkotaan.

## **2. Pemberian Beasiswa Murid Miskin**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, diantara faktor penyebab anak

putus sekolah dilingkungan masyarakat Suku Asli/KAT adalah dikarenakan faktor ekonomi yang paling mendominasi, permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak putus sekolah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelayanan berupa bantuan beasiswa khusus murid dari golongan yang tidak mampu di Kabupaten Kepulauan Meranti, agar mereka bisa bersekolah dan tidak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi/kemiskinan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah memberikan beasiswa untuk memotivasi murid yang kurang mampu, agar mereka bersemangat untuk sekolah dan tidak lagi ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyalurkan beasiswa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk murid yang tergolong tidak mampu sebesar Rp. 400. 000, 00 perorang dan juga menyalurkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp. 360. 000, 00 perorang, mayoritas murid KAT juga menerima beasiswa ini, tetapi susahny orangtua murid dari suku asli ini setelah mendapatkan beasiswa uang bantuan ini bukan mereka peruntukkan untuk membeli perlengkapan bersekolah anak mereka, mereka lebih banyak menggunakan uang itu untuk keperluan sehari-hari, untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus lebih selektif lagi membuat kebijakan pemberian beasiswa ini.

## **B. Pembangunan (*Development*)**

### **1. Pembangunan Asrama Pelajar Suku Asli / KAT**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pendidikan Komunitas Adat Terpencil melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembangunan asrama pelajar suku asli/Komunitas Adat

Terpencil di Kecamatan Tebing Tinggi, di Kota Selat Panjang, asrama ini dikhususkan untuk anak – anak suku asli/Komunitas Adat Terpencil yang ingin melanjutkan pendidikan, asrama tersebut dibangun untuk membantu memudahkan anak – anak KAT dari berbagai pelosok desa untuk melanjutkan pendidikan baik itu SMP maupun SMA/SMK/MA, di asrama inipun gratis untuk anak-anak KAT yang ingin tinggal disini agar mereka bisa melanjutkan pendidikan, di asrama ini mempunyai 16 kamar, 8 kamar untuk anak lelaki dan 8 kamar lagi untuk anak perempuan, dan disatu kamar mempunyai 4 tempat tidur yang dibangun bertingkat.

Namun asrama yang dibangun belum berfungsi maksimal, sebab hanya sedikit anak – anak KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mau menyambung pendidikan, sehingga kamar yang disediakan tidak semuanya terpakai, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah mengirim surat kepada Kades yang daerahnya ada KAT, namun dikarenakan minat belajar anak – anak di KAT ini rendah, sehingga tidak banyak yang mau menyambung sekolah dan menginap di asrama khusus KAT ini, sejauh ini hanya sekitar 6 orang yang menempati di asrama ini.

### **C. Pemberdayaan (*Empowering*)**

#### **1. Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat Suku Asli / KAT**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat Suku Asli / KAT, sosialisasi yang dilakukan sebagai pemberdayaan terhadap masyarakat KAT ini, pemberdayaan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari pendidikan /bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi.

Banyaknya anak yang tidak sekolah dan putus sekolah karena

perhatian orangtua yang kurang dan faktor budaya, kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orangtua tentang arti penting pendidikan anak-anaknya begitu juga dengan faktor budaya, faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat terhadap pendidikan, mereka lebih mementingkan bekerja dari pada pendidikan, bagi mereka pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, karena dengan lingkungan pekerjaan yang rendah dan bahkan tidak memerlukan ijazah mempengaruhi motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya karena mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan mereka beranggapan bahwa sekolah itu hanya membuang waktu dengan percuma dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang mereka jalani, lebih baik bekerja dari pada sekolah.

### **D. Pengaturan (*Regulation*)**

#### **1. Kebijakan Kelonggaran – Kelonggaran Peraturan di SDN 21**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan pengaturan berupa kebijakan kelonggaran – kelonggaran peraturan di SDN 21 Desa Sesap agar masyarakat KAT yang bersuku kan suku asli ini mau bersekolah, kebijakan kelonggaran – kelonggaran peraturan yang diberikan seperti pendaftaran sekolah yang tidak dibatasi usia, tidak adanya syarat membawa akta kelahiran untuk mendaftar sekolah dan tidak adanya keharusan untuk memakai seragam sekolah, kalau tidak mempunyainya khusus untuk suku asli yang mau bersekolah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan pihak sekolah agar memberikan kelonggaran - kelonggaran peraturan untuk masyarakat suku asli ini, agar mereka mau bersekolah.

• **Faktor – Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014.**

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014, dari beberapa program yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui instansi – instansi yang terkait tentunya mengalami faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaannya, adapun faktor – faktor penghambat dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

**1. Faktor Ketidak Pedulian Orangtua**

Faktor ketidak pedulian orangtua adalah salah satu faktor penghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap ini karena faktor ketidak pedulian orangtua adalah faktor internal penyebab rendahnya pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap motivasi anak untuk bersekolah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku orang tua untuk menyekolahkan anak mereka adalah faktor pendidikan, dimana pendidikan yang rendah menjadi pendorong orang tua untuk memiliki semangat menyekolahkan anak mereka, di samping itu tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi jenis pekerjaan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk dapat memiliki kehidupan yang layak.

Namun jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi persepsi orang tua terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak mereka,

karena dengan lingkungan pekerjaan yang rendah dan bahkan tidak memerlukan ijazah mempengaruhi motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya karena mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan mereka beranggapan bahwa sekolah itu hanya membuang waktu dengan percuma dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang mereka jalani.

Faktor ketidak pedulian orangtua terhadap pendidikan anak mereka menjadi salah satu penghambat tidak mau sekolah maupun putus sekolah di Komunitas Adat Terpencil yang bersukukan suku asli di Desa Sesap ini karena tidak adanya motivasi dari orangtua untuk menyekolahkan anak mereka, yang mereka tau bekerja dan bekerja sehingga terbengkalailah pendidikan anak-anak mereka.

**2. Faktor Tidak Mau Ikut Ujian**

Sekolah pasti ada ujian dimana mengetes kemampuan para peserta didik dengan ilmu yang telah dipelajari selama bersekolah, namun Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap ini banyak yang tidak mau mengikuti ujian dikarenakan takut tidak bisa menjawab soal yang diberikan, sehingga faktor tidak mau ikut ujian ini menjadi faktor penghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap ini.

Tidak maunya ikut ujian adalah salah satu faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pendidikan di Komunitas Adat Terpencil ini masyarakat suku asli banyak yang tidak mau ikut ujian kalau tidak dijemput oleh guru di PKBM ini dengan alasan takut tidak bisa menjawab soal yang diberikan, mereka beranggapan bahwa soal yang diberikan itu susah

## PENUTUP

Penutup ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014.

### *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari hasil dan penelitian ini sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 - 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A, B dan juga program (KF) Keaksaraan Fungsional dan Keterampilan Fungsional.
  - b. Pemberian Beasiswa Murid Miskin
  - c. Pembangunan Asrama Pelajar Suku Asli / KAT
  - d. Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat KAT
  - e. Kebijakan Kelonggaran – Kelonggaran Peraturan di SDN 21
2. Faktor – Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. Faktor Ketidak Pedulian Orangtua
  - b. Faktor Tidak Mau Ikut Ujian.

### *Saran*

Adapun yang menjadi saran penulis dalam masalah yang telah dibahas adalah :

1. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap program yang ada di Pusat Kegiatan Masyarakat khusus untuk KAT yang bersuku suku asli, agar menemukan solusi yang tepat dikarenakan masih sangat banyak KAT di Desa Sesap ini yang tidak mengikuti program yang ada di PKBM ini.
2. Pemerintah Daerah harus lebih selektif lagi melakukan kebijakan bantuan beasiswa, dikarenakan bantuan beasiswa bukan diperuntukkan untuk keperluan sekolah, namun digunakan orangtua mereka untuk keperluan sehari-hari, sedangkan banyak anak suku asli ini tidak punya seragam sekolah, maupun perlengkapan sekolah lainnya.
3. Pemerintah Daerah perlu terus melakukan sosialisasi memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari pendidikan/bersekolah agar bisa memotivasi dan menyadarkan para orangtua di KAT ini akan pentingnya pendidikan anak-anak mereka di karenakan faktor tidak sekolah maupun putus sekolah disebabkan ketidak pedulian orangtua terhadap pendidikan anak-anaknya.
4. Pemerintah Daerah harus saling berkoordinasi melalui instansi – instansi terkait dalam meningkatkan pendidikan KAT ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Almasdi Syahza, SE, M.P. 2009. *Metodologi Penelitian*. Riau : CV. Witra Irzani.
- Deddy Supriady Bratakusumah, Ph.D dan Dadang Solihin, MA. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman, M.pd, M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2011. *Metode Penelitian Sosial, edisi kedua*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hessel Nogi S Tangkilisan. 2008. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Hamid Patilima. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta.
- Inu Kencana Syafii. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Perca. Manila.
- Manila. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Labolo. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Pemerintahan Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suriansyah Murhaini, SH, MH. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Zaidan Nawawi, M.SI. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

### Dokumen

- Undang-Undang Pasal 31 Tahun 1945 Tentang Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Web

- <http://www.kajianteorikomunikasi.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>
- [http://www.academia.edu/11365850/Teori\\_Pengawasan](http://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan)
- [http://www.academia.edu/11365850/Teori\\_Pengawasan](http://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan)